

## Produksi Sampah Tergolong Masih Tinggi

**MAGELANG (KR)** - Produksi sampah di wilayah Kota Magelang setiap harinya tergolong masih tinggi. Sampai saat ini masih ditangani sampah sekitar 50 ton hingga 60 ton setiap harinya. Diharapkan sedikit demi sedikit dapat dikurangi, karena sampahnya diolah.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang M Yunus AP MH kepada wartawan usai puncak kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup seDunia Tahun 2023, yang diwarnai dengan kegiatan Ekspo Lingkungan Hidup, dan dilaksanakan di alun-alun Kota Magelang, Senin (3/7). Dalam rangkaian kegiatan yang dibuka Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH tersebut juga dilakukan penyerahan beberapa lomba berkaitan dengan lingkungan hidup.

Yunus mengatakan produksi sampah-sampah tersebut campuran. Sebetulnya masih dapat dikurangi dengan cara dimanfaatkan atau pemilahan. Yunus menyayangkan sampah tersebut dibuang, mengingat hal itu bisa diolah. Hanya saja masih dibentuk kelompok-kelompok masyarakat, mengingat kesibukan masyarakat berbeda-beda. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan sampah dinilai cukup tinggi. Hanya saja hidup di wilayah perkotaan yang majemuk, memiliki aktivitas kesibukan masing-masing.

Jumlah produksi sampah sekitar 50 ton hingga 60 ton ini belum terlalu signifikan angka penurunannya dibanding sebelumnya. Berdasar catatannya, lanjut Yunus, pengurangannya baru sekitar 5-10 persen. Kalau tidak dikurangi semenjak pandemi Covid-19, diyakini yang biasanya 50 ton hingga 60 ton tersebut kemungkinan bisa mencapai angka 70-80 ton setiap harinya yang dibuang di TPS manakala dilepas. (Tha)-f



KR-Thoha

Penyerahan hadiah lomba.

## Berubah Luas Tanah Exit Tol Pattimura

**SALATIGA (KR)** - Luas tanah bengkok milik Desa Pabelan, Kabupaten Semarang yang akan dibebaskan untuk exit jalan tol Pattimura Salatiga berubah luasnya. Hasil pengukuran terbaru yang sebelumnya luasnya 577 meter persegi kini bertambah menjadi 629 meter persegi yang diganti. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Salatiga, Agung Hendratmiko kepada KR mengatakan sudah ada rapat besar beberapa pihak.

Tanah milik Desa Pabelan sebelumnya luasnya 577 meter persegi kini bertambah luas karena menyesuaikan desain baru exit tol dari Trans Marga Jateng (TMJ) dan telah diukur ulang oleh BPN. "Sesuai desain baru luas tanah untuk exit tol yang melewati tanah milik Desa Pabelan menjadi 629 meter persegi yang harus dibebaskan," kata Agung Hendratmiko, Senin (3/7). Rapat bersama digelar oleh Bappeda Salatiga bersama 10 instansi lainnya terdiri, DPUR, Pemkab Semarang diwakili asisten 1, Camat Pabelan, BUMD Desa Pabelan, DPKP, TMJ dan Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Kamis (15/6) lalu.

Hasilnya adalah menunggu persetujuan Dirjen Bina Marga untuk melaksanakan pembangunan berbarengan dengan proses penetapan tanah pengganti. Pihak Pemkab Semarang, Salatiga, Provinsi Jateng, Desa dan Kecamatan Pabelan, dan TMJ melaksanakan proses ganti rugi berdasarkan appraisal tanah dan aset yang ada di atasnya. "Hasil rapat bersama, peserta rapat sepakat Semua berkomitmen untuk segera dibangun. Kita menunggu Dirjen Bina Marga," kata Agung Hendratmiko. (Sus)-f

## Pascagempa Perbaikan Sekolah Diprioritaskan

**WONOGIRI (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan gerak cepat dalam penanganan dampak gempa Bantul berkekuatan 6,6 SR di Kabupaten Wonogiri. Ganjar mengerahkan sejumlah kekuatan dan kemampuan agar penanganan pascagempa bisa dipercepat. Ganjar Pranowo Senin (3/7) langsung meninjau dampak gempa di Wonogiri untuk untuk mengecek sejumlah lokasi yang terdampak. Didampingi Kepala BMKG, Dwi Korita dan sejumlah jajaran dinas terkait Pemprov Jateng, Ganjar mengecek kondisi SMKN 1 Pracimantoro, SMPN 1 Giriwoyo, serta sejumlah tempat ibadah hingga rumah warga yang terdampak gempa.

Ganjar mengatakan mendapat laporan gempa saat dirinya menunaikan ibadah

haji. Ganjar langsung memerintahkan jajarannya untuk turunkan tim, cek kondisi masyarakat dan inventarisir kerusakan. Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui beberapa bangunan rusak parah dan harus segera diperbaiki. Beberapa bangunan yang masuk dalam kategori rusak parah adalah sekolah.

Seperti SMKN 1 Pracimantoro, ada 14 gedung dan 27 ruang kelas, praktikum dan aula yang rusak akibat gempa. Kerusakan terjadi cukup parah, yakni genteng terlepas, plafon ambrol, tembok retak, dan lainnya. "Sekolah menjadi prioritas karena sebentar lagi anak-anak masuk kelas. Tapi tidak hanya diperbaiki, saya minta dicek betul dan ada tim yang melakukan audit terkait kondisi gedung pasca gempa apakah masih

kuat dan aman atau tidak. Sebab dari pengecekannya, ada bagian gedung yang retak dan cukup membahayakan. Tim juga menemukan ada atap genteng berbahan beton yang rawan ambrol," ujar Ganjar.

Selain di Wonogiri, Pemprov juga menyiapkan anggaran untuk perbaikan dampak gempa Bantul di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya bangunan sekolah, namun juga tempat ibadah dan rumah warga. Untuk itu tim Pemprov Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pemda setempat, mana yang jadi prioritas perbaikan. Untuk anggaran, selain dari anggaran negara juga dioptimalkan dari UPZ, CSR dan lainnya agar lebih cepat. Jika masih kurang akan koordinasi dengan BNPB.

Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Pracimantoro,

Bambang mengatakan, ada 14 gedung dan 27 ruangan yang rusak akibat gempa. Mayoritas kerusakan pada bagian atap dan dinding bangunan. "Selain gedung, peralatan kami juga ada

yang rusak. Ada beberapa unit komputer, LCD, AC dan lainnya. Kami berharap bisa segera diperbaiki karena sebentar lagi anak-anak masuk sekolah," ucapnya.

(Bdi/Dsh)-f



KR-Budiono

Ganjar Pranowo (nomor 2 dari kanan) saat meninjau SMKN 1 Pracimantoro, Wonogiri, yang rusak parah akibat gempa.

## Nyaleg, Juliyatmono Undur Diri Sebagai Bupati

**KARANGANYAR (KR)** - DPRD Kabupaten Karanganyar memproses pengunduran diri Juliyatmono dari jabatan Bupati. Rencana Juliyatmono nyaleg DPR RI pada Pemilu 2024 mengharuskannya meninggalkan kursi kepala daerah yang sudah dijalannya dua periode. Surat pengunduran diri sudah disampaikan ke DPRD tertanggal 13 Mei 2023.

Selanjutnya, DPRD meneruskan pengajuan itu ke Mendagri dengan terlebih dulu menggelar rapat paripurna dengan agenda pengunduran diri Bupati Karanganyar periode 2018-2023 pada Kamis (6/7).

Dalam berbagai kesempatan, Juliyatmono memastikan dirinya bakal maju dari Partai Golkar sebagai bacaleg di dapil IV Jateng

(Karanganyar, Sragen, Wonogiri) pada pemilu 2024. Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo membenarkan adanya surat dari bupati perihial itu. Sekretariat DPRD yang menerimanya pertengahan Mei lalu langsung menjadwalkan paripurna pengunduran bupati pada Kamis besok.

"Itu hak beliau dalam berpolitik.

Suratnya ditandatangani 13 Mei. Tugas kami di DPRD untuk memprosesnya," kata Bagus Selo, Selasa (4/7).

Setelah diparipurnakan, berita acara akan dikirim ke Mendagri agar mendapat surat balasan. Dokumen itulah yang akan mendasari penunjukan pelaksana jabatan bupati yang mnggantikan Juliyatmono memimpin Karanganyar sampai periode berakhir 15 Desember 2023.

Sesuai aturan, Bagus Selo mengatakan Wakil Bupati (Wabup) Rober Christanto secara otomatis akan ditetapkan sebagai Plt Bupati Karanganyar. Jabatan Plt Bupati Karanganyar ini akan dipegang hingga berakhirnya masa ja-

batan pada 15 Desember mendatang. Kemudian Kemendagri akan menunjuk dan menetapkan Penjabat (Pj) Bupati.

"Otomatis nanti pak Wabup yang menjadi Plt Bupati. Di aturan jelas jika kepala daerah berhalangan tetap misalnya meninggal dunia, atau mundur wabup yang menggantikan," katanya.

Ketua DPD II Partai Golkar Karanganyar Ilyas Akbar Almadani mengatakan Juliyatmono dicalonkan oleh Partai Golkar untuk maju ke DPR RI di Pemilu 2024. Ia mengatakan, performa Juliyatmono saat menjadi Bupati Karanganyar bagus sehingga pantas naik level. (Lim)-f

## Traffic Bandara A Yani Capai 169 Ribu Penumpang

**SEMARANG (KR)** - Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang telah melayani penumpang sebanyak 169.632 orang sepanjang Juni 2023. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan dengan pergerakan penumpang pada periode Juni 2022 yakni sebanyak 141.456 orang penumpang.

Pertumbuhan juga terjadi pada pergerakan pesawat udara pada Juni 2023 dengan jumlah 1.458 pergerakan atau tumbuh sebesar 25% jika dibandingkan jumlah pesawat pada Juni 2022 yakni sebanyak 1.168 pergerakan. Sedangkan untuk trafik kargo, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang melayani sebanyak 837.046 kg kargo pada periode Juni 2023 atau tumbuh sebesar 86% dibandingkan trafik kargo Juni 2022 sebesar 450.304 kg.

General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Inter-

nasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Hardi Ariyanto Selasa (4/7) mengatakan, secara keseluruhan, pergerakan trafik di bandara kami meningkat sebanyak 20% untuk penumpang, 25% untuk pesawat dan yang tertinggi 86% untuk kargo jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode Juni 2023 ini, pergerakan penumpang terbanyak terjadi pada tanggal 28 Juni 2023 yang bertepatan dengan momentum cuti bersama Hari Raya Idul Adha tahun 2023 yaitu sebanyak 6.759 orang penumpang.

Seiring dengan terus terjadinya trend pertumbuhan trafik di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, manajemen PT Angkasa Pura I bersama dengan instansi terkait terus berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa

bandara. Salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan pada pengguna jasa, manajemen PT Angkasa Pura I memastikan kemudahan konektivitas penumpang de-

ngan memastikan tersedianya layanan transportasi umum, diantaranya Trans Semarang (BRT), taksi bandara dan transportasi berbasis online. (Cha)-f



KR-Chandra AN

Para penumpang datang dan pergi dari Bandara A Yani Semarang meningkat selama bulan Juni.

## BKPAD Sukoharjo Gencarkan Jemput Bola Wajib Pajak

**SUKOHARJO (KR)** - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Sukoharjo gencarkan jemput bola dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) mendatangi langsung wajib pajak disemua wilayah dengan sasaran utama perkotaan.

Kota dipilih karena memiliki catatan pembayaran paling sulit dibandingkan warga pedesaan. Langkah tersebut diambil sekaligus percepatan pelunasan ditingkat desa dan kelurahan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Selasa (4/7) mengatakan, pelayanan pembayaran PBB sudah masuk bulan ketujuh atau Juli 2023 sejak dibuka Januari lalu.

BKPAD Sukoharjo melakukan kebijakan percepatan pelunasan PBB dari wajib pajak dengan gencar melakukan jemput bola. Pelayanan dilakukan dengan menerjunkan petugas secara bergantian keliling wilayah.

Langkah tersebut diambil selain mempercepat, juga mempermudah proses pembayaran PBB dari wajib pajak.

Sebab kondisi sekarang meski sudah banyak dibuka tempat pelayanan pembayaran dan semakin dipermudah melalui online,

namun tetap saja masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB secepatnya atau tepat waktu sebelum jatuh tempo 30 September.

"Banyak wajib pajak yang terbiasa membayar diakhir waktu menjelang jatuh tempo karena alasan belum sempet membayar. Padahal sudah punya uang. Karena itu kami dekatkan pelayanan pembayaran PBB melalui jemput bola keliling wilayah. Sasaran utama sekarang wajib pajak di perkotaan," ujarnya.

BKPAD Sukoharjo sengaja menyar wajib pajak perkotaan karena paling sulit dan lama dalam proses pelunasan pembayaran PBB. Selain itu diperkotaan juga memiliki jumlah wajib pajak yang banyak dan nilai besar.

"Inilah yang kami harapkan para wajib pajak bisa segera membayar PBB tanpa harus menunggu mepet jatuh tempo," lanjutnya.

Sasaran jemput boleh PBB akan dilakukan di wilayah perkotaan seperti di beberapa kelurahan di Kecamatan Sukoharjo Kota. Selain itu juga di beberapa desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.

Sosialiasi gencar dilakukan BKPAD Sukoharjo dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya informasi diteruskan dan disam-

paikan di tingkat RT dan RW. Dengan demikian para wajib pajak dapat mengetahui jadwal jemput bola dan segera membayar PBB.

"Termasuk wajib pajak perusahaan kebanyakan di kota kami sasar karena memiliki nilai tanggungan PBB besar," lanjutnya.

Richard mengatakan, ada sebelas desa dari total 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo yang lunas 100 persen pembayaran PBB.

Capaian tersebut berhasil dilakukan sebelas desa dalam rentang waktu singkat setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terbit Januari 2023.

Sebelas desa tersebut menjadi langganan desa yang berhasil mencapai 100 persen pelunasan pembayaran PBB setiap tahun. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras petugas dan tingginya kesadaran wajib pajak.

"Di satu sisi petugas harus kerja keras meningkatkan kinerja dengan mempercepat pengiriman SPPT, kemudian menarik pembayaran PBB. Disisi lain, perlu kesadaran wajib pajak artinya dengan kesadaran diri sendiri setelah menerima SPPT segera membayar dan tidak menunda apalagi menunggu sampai jatuh tempo 30 September. Apalagi PBB ini rutin dilakukan setiap tahun oleh wajib pajak," lanjutnya. (Mam)-f

### Mimbar Legislatif

#### Komisi E Ingin Kesyambungan Antara BPJS dan Rumah Sakit

**KETUA** Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan, selama ini banyak keluhan dari peserta BPJS terutama dalam hal klaim pembayaran. Keluhan yang kerap muncul adalah tidak tercovernya pembayaran jaminan serta permasalahan pelayanan bagi keluarga miskin penerima bantuan iuran.

Abdul Hamid mengatakan hal ini saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi E didampingi tujuh direktur RSUD milik Pemprov Jawa Tengah. Kunjungan dimaksudkan untuk melakukan sinergitas dalam hal pelayanan jaminan kesehatan. Kunjungan juga dimaksudkan agar ada sinergitas BPJS dengan pengelola rumah sakit. RSUD mengeluh karena kerap ada masalah dengan penerima bantuan iuran. Untuk memecahkan permasalahan itu harus ada kebijakan dari BPJS kesehatan.

Untuk itu, selaku wakil rakyat, Komisi E harus bisa menyambungkan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat sebagai peserta maupun penerima bantuan dengan rumah sakit dan BPJS. Tiga pihak ini harus bisa sejalan sesuai dengan aturan yang ada. Komisi E DPRD Jawa Tengah juga mempertanyakan mengenai pembayaran BPJS yang menunggak apakah masih mendapatkan pelayanan kesehatan,

karena banyak kasus pihak rumah sakit belum bisa memberikan pelayanan dikarenakan masih ada tunggakan pembayaran.

Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi BPJS Kesehatan Siswandi, dalam pertemuan tersebut menjelaskan, sesuai UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi dan keuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Januari 2023m jumlah peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di Jawa Tengah mencapai 32.989.184 jiwa (88,99%) dari jumlah penduduk. Peningkatan UHC sangat signifikan terjadi sekitar awal 2022.

Pada awal 2022, hanya empat daerah di Jateng yang mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95% dari total jumlah penduduk, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Kota Magelang, dan Kudus. Namun mulai Agustus 2022 jumlah daerah yang mencapai UHC meningkat menjadi 11 daerah. (\*)-f

(Disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)